

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN  
KEBENCANAAN PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018  
(Studi Kasus: SMP Negeri 1 Wanayasa, SMP Negeri 1 Batur, SMP Negeri 1  
Karangkobar, SMP Ma'arif NU 01 Karangkobar)**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun Oleh:  
Dyah Nur Permatasari  
NIM. 20150520245**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2019**

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDIDIKAN  
KEBENCANAAN PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DI  
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018**  
(Studi Kasus: SMP Negeri 1 Wanayasa, SMP Negeri 1 Batur, SMP Negeri 1  
Karangkobar, SMP Ma'arif NU 01 Karangkobar)

**Dyah Nur Permatasari**

Program Studi Ilmu Pemerintahan  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Email: [permatasaridyahnur@gmail.com](mailto:permatasaridyahnur@gmail.com)

**ABSTRAK**

Sebanyak 70% wilayah di Banjarnegara merupakan zona merah rawan bencana alam bahkan sebagian besar diantaranya terletak di lingkungan sekolah. Sektor pendidikan dapat menjadi agen utama yang dapat membangun budaya sadar bencana di lingkungannya sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi bencana. Program pendidikan kebencanaan pada jenjang sekolah menengah merupakan inisiasi program dari BPBD Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Muatan Lokal Kebencanaan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga dapat menggambarkan masalah yang sedang berlangsung sebagaimana yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 2 dari 4 sekolah telah melaksanakan program pendidikan kebencanaan melalui pengintegrasian materi kebencanaan ke dalam mata pelajaran maupun ekstrakurikuler berdasar pada buku muatan lokal kebencanaan, diantaranya SMP Negeri 1 Batur dan SMP Negeri 1 Wanayasa. Pendidikan kebencanaan ini mencakup berbagai aspek penting seputar kebencanaan, seperti pengenalan potensi bencana yang ada di sekitar lingkungan, riwayat bencana yang pernah terjadi, bentuk antisipasi/mitigasi bencana, dampak bencana bagi individu maupun kelompok, bentuk penanganan ketika terjadi bencana, serta cara penyelamatan diri dari bencana yang terjadi. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran tidak sebanding dengan banyaknya kegiatan-kegiatan yang direncanakan sebelumnya. Anggaran yang ada belum mencukupi seluruh kegiatan yang ada, salah satunya pencetakan buku muatan kebencanaan. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program pendidikan kebencanaan sudah berjalan dengan baik dan semestinya meski belum maksimal dan masih terdapat kendala dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang masih terbatas sehingga menghambat jalannya kegiatan yang ada. Oleh karena itu, sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan dengan terlibat langsung dan mengikuti jalannya program sehingga mampu mengoptimalkan pelaksanaan program pendidikan kebencanaan sehingga terwujud budaya aman dan tangguh bencana di sekolah.

***Kata kunci: Bencana, Pendidikan Kebencanaan, Kabupaten Banjarnegara.***

## PENDAHULUAN

Bencana terjadi tanpa mengenal batas geografis dan administratif suatu negara. Indonesia merupakan salah satu wilayah yang memiliki tingkat potensi bencana tinggi karena termasuk ke dalam zona cincin api atau *ring of fire* sehingga segala kemungkinan bencana bisa saja terjadi. Berbagai bencana pernah melanda negeri ini, bahkan beberapa diantaranya tercatat sebagai bencana alam terdahsyat di dunia. Salah satu wilayah di Indonesia yang tergolong memiliki tingkat kerawanan bencana sangat tinggi adalah Kabupaten Banjarnegara. Sebanyak 70% wilayah di Banjarnegara merupakan zona merah rawan bencana alam (Muzaki, 2018).

Potensi bencana di Banjarnegara diantaranya, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, gas beracun, dan kekeringan. Potensi bencana alam yang sangat besar ini mengakibatkan besarnya kerugian moral maupun materiil. Hal ini dibuktikan dengan bencana tanah longsor di Jemblung tahun 2014, gempa bumi di Kalibening akhir tahun 2017 hingga awal tahun 2018 dan pada pertengahan tahun 2018 lalu beberapa wilayah terdampak kekeringan. Menurut Wisner, bencana alam termasuk ke dalam bencana dengan tipe *rapid onset* atau kejadian yang berlangsung secara cepat dan memiliki total kontribusi presentase kematian hingga 13 persen (Putri, 2017). Masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa bencana terjadi karena kondisi

daerah yang ditempati memang daerah rawan. Kesadaran tersebut dapat membangun sikap dasar bahwa bencana terjadi karena kondisi alam dan bukan disebabkan karena faktor lain.

Hingga kini, sebagian dari masyarakat masih memiliki *mindset* bahwa setiap bencana yang terjadi memiliki keterkaitan erat dengan alam. Misalnya, bencana yang terjadi akibat kemarahan Tuhan. Seperti kita ketahui bahwa faktor penyebab terjadinya bencana bukan hanya karena faktor alam ataupun kemarahan Tuhan, namun juga dapat terjadi karena faktor manusia itu sendiri. Berbagai upaya pengurangan resiko bencana dapat dilakukan melalui banyak hal, salah satunya yakni dengan memberikan bekal pengetahuan kebencanaan kepada generasi muda terhadap potensi bencana yang ada di sekitar lingkungan tersebut. Pendidikan bencana, pendidikan resiko bencana dan pendidikan pencegahan bencana merupakan ekspresi berbeda yang pada dasarnya memiliki arti sebagai pendidikan pengurangan resiko bencana (Shaw, Shiwaku, & Takeuchi, 2011). Pendidikan bencana ini sebenarnya telah diterapkan diberbagai negara seperti, di Jepang dan Filipina yang telah menerapkannya sejak di bangku sekolah dan sudah masuk ke dalam kurikulum nasional. Begitu pula dengan China, implementasi pendidikan kebencanaan di kampus-kampus dilakukan melalui penyuluhan dan pelatihan keselamatan dan darurat

bencana di asrama setiap awal tahun ajaran baru bahkan Beijing Jiaotong University menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan (Putri, 2017).

Pendidikan kebencanaan menjadi sangat penting mengingat besarnya potensi bencana di Kabupaten Banjarnegara serta kurangnya pengetahuan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap terjadinya bencana yang didasarkan pada banyaknya korban jiwa saat terjadinya bencana. Pentingnya pendidikan kebencanaan sejak dini bertujuan untuk meminimalisir dampak resiko bencana yang ada di wilayah tersebut. Pendidikan kebencanaan ini mencakup berbagai aspek penting seputar kebencanaan, seperti pengenalan potensi bencana yang ada di sekitar lingkungan, riwayat bencana yang pernah terjadi, bentuk antisipasi/mitigasi bencana, dampak bencana bagi individu maupun kelompok, bentuk penanganan ketika terjadi bencana, serta cara penyelamatan diri dari bencana yang terjadi (Pantjastuti & dkk, 2015).

Pendidikan kebencanaan dapat disosialisasikan dan diajarkan di berbagai macam lembaga pendidikan, baik sekolah, komunitas bahkan di dalam keluarga. Pendidikan kebencanaan di Kabupaten Banjarnegara diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Banjarnegara, PMI, serta pihak terkait lainnya melalui program pendidikan kebencanaan bagi sekolah menengah di Kabupaten Banjarnegara. Dasar hukum penyelenggaraan program pendidikan kebencanaan ini yakni berdasar pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Muatan Lokal Kebencanaan. Program tersebut didasari oleh pertimbangan banyaknya gedung sekolah yang berada di zona rawan bencana alam.

Materi kebencanaan akan masuk ke dalam kurikulum selevel dengan mata pelajaran muatan lokal. Selain itu, materi kebencanaan ini terintegrasi dengan mata pelajaran lain seperti, IPS, IPA, hingga olahraga serta ekstrakurikuler, seperti pramuka sehingga para pengajar pun ikut serta memahami materi terkait kebencanaan. Pertimbangan lain yakni karena belum ada sekolah yang menerapkan standar pengamanan kebencanaan seperti jalur evakuasi, titik kumpul hingga keberadaan alat pemadam kebakaran.

Guna menjamin keberhasilan program, maka harus dilakukan evaluasi pelaksanaan program. Pelaksanaan program pendidikan kebencanaan ini masih relatif baru karena baru mulai dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru 2018/2019, sehingga pelaksanaannya masih belum maksimal. Untuk itu, peneliti ingin mengkaji sejauh mana realisasi pelaksanaan program pendidikan kebencanaan yang kini tengah dilaksanakan di sekolah-sekolah menengah serta efektivitas pelaksanaan

program tersebut. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka peneliti memilih judul penelitian “Evaluasi Pelaksanaan Program Pendidikan Kebencanaan pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018”.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Wigny Adiyoso dan Hidehiko Kanegae (2013) dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Dampak Penerapan Pendidikan Kebencanaan di Sekolah terhadap Kesiapsiagaan Siswa Menghadapi Bencana Tsunami di Aceh, Indonesia”. Peneliti menggunakan metodologi survei dengan membagikan kuesioner ke lapangan guna mendapatkan data yang diperlukan. Hasil dari penelitian tersebut menjabarkan bahwa efek dari sekolah yang mengadopsi isu bencana dinilai efektif dalam peningkatan pengetahuan bencana, meningkatkan tingkat persepsi resiko, serta kesiapsiagaan individu dan sekolah. Selain itu, penerapan isu bencana berbasis kurikulum di sekolah dapat membangkitkan sikap kesiapsiagaan anak-anak sekolah meskipun terbatas hanya pada kunjungan ke fasilitas pendidikan dan fasilitas darurat.

Sabri, Sri Adelia Sari, Sri Milfayetty, dan M. Dirhamsyah (2014) dalam penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengintegrasian Materi Kebencanaan ke dalam Kurikulum Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Pada Siswa Sekolah Dasar dan Menengah di Banda

Aceh”. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif, penulis menggunakan kuesioner untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Penulis menyimpulkan bahwa tingkat kesiapsiagaan siswa berada pada kategori baik serta terdapat pengaruh yang bermakna antara pengetahuan, sikap, partisipasi dan kompetensi dengan kesiapsiagaan pada siswa. Pengintegrasian pendidikan kebencanaan mengenai resiko bencana ke dalam kurikulum merupakan prioritas yang dapat memberikan kontribusi terhadap kemajuan suatu negara menuju Tujuan Pembangunan Milenium. Strategi kesiapsiagaan dalam pendidikan kebencanaan sangat diperlukan karena selain dapat meningkatkan kapasitas juga dapat dijadikan pengembangan pendidikan kebencanaan yang berkaitan dengan PRB.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang dapat digambarkan secara sistematis mengenai suatu keadaan, situasi dan fenomena yang terjadi. Lokasi penelitian yang diambil yakni Kabupaten Banjarnegara, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjarnegara, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara dan 4 Sekolah Menengah Pertama di wilayah Banjarnegara. Hal tersebut dikarenakan Banjarnegara memiliki potensi bencana yang cukup

besar serta partisipasi dan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi dan menanggulangi bencana masih tergolong rendah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Evaluasi Program Pendidikan Kebencanaan**

Program pendidikan kebencanaan merupakan inisiasi dari BPBD Kabupaten Banjarnegara yang kemudian bekerja sama dengan pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dan PMI Kabupaten Banjarnegara. Program tersebut bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan pengetahuan akan kebencanaan bagi masyarakat terutama bagi generasi muda jenjang sekolah menengah di Kabupaten Banjarnegara khususnya, sehingga resiko bencana dapat diminimalisir. Mengingat tingginya potensi bencana yang ada di Indonesia serta masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap penanggulangan dan kesiapsiagaan bencana, maka pemerintah melalui Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana memberikan mandat kepada seluruh kalangan untuk dapat bahu membahu dalam hal mengurangi dan meminimalisir resiko yang ditimbulkan akibat kejadian bencana, baik bencana alam maupun bencana kemanusiaan. Pendidikan kebencanaan diatur secara spesifik

dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Muatan Lokal Kebencanaan yang diperuntukan bagi jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

### ***Relevansi Program Pendidikan Kebencanaan***

Relevansi memiliki arti sebagai sejauh mana tujuan dari sebuah program dapat berjalan dan terealisasi sesuai dengan apa yang telah disepakati sebelumnya antara pembuat kebijakan dan penerima manfaat, prioritas, dan kebutuhan program. Relevansi dapat dilihat melalui kesesuaian kebutuhan terhadap perencanaan dengan pelaksanaan program serta kesesuaian perencanaan dengan tujuan program.

#### **1. Kesesuaian Kebutuhan terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pendidikan Kebencanaan**

Setiap organisasi pasti memiliki kebutuhan yang ingin dipenuhi agar tujuan sebuah program/kegiatan dapat tercapai dengan baik. Dalam pelaksanaan program, kebutuhan tersebut tentu harus memiliki keselarasan dengan perencanaan yang telah disusun sebelumnya. Kebutuhan tersebut dapat berupa kebutuhan fisik, finansial, maupun sumber daya manusia.

### ***Kebutuhan Fisik***

Kebutuhan fisik merupakan kebutuhan nyata yang diperlukan dan harus dipenuhi untuk menunjang jalannya sebuah program agar berjalan dengan baik dan lancar. Kebutuhan fisik dalam program pendidikan kebencanaan pada jenjang sekolah menengah yakni berupa kurikulum kebencanaan, buku modul kebencanaan, dan pemasangan rambu-rambu kebencanaan.

Penyusunan kurikulum muatan lokal kebencanaan berdasarkan pada Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2017 tentang Muatan Lokal Kebencanaan. Penyusunan kurikulum tersebut dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara dengan melibatkan tenaga ahli atau peneliti di bidang kebencanaan, yakni Bapak Tuswadi yang juga berprofesi sebagai guru di salah satu SMA di Banjarnegara. Kurikulum tersebut disusun dengan mempertimbangkan potensi, karakteristik, dan kebutuhan daerah yang mencerminkan kekhasan dari daerah tersebut. Besarnya potensi bencana yang ada di Banjarnegara telah menjadi ciri khas dari daerah tersebut. Kurikulum tersebut diperuntukkan bagi jenjang SMP dan sudah didistribusikan kepada masing-masing SMP di wilayah Banjarnegara.

Kurikulum kebencanaan yang diterapkan tersebut menggunakan jenis kurikulum terintegrasi (*integrated curriculum*). Muatan lokal biasanya merupakan bentuk kurikulum terpisah, namun Dindikpora Banjarnegara memilih untuk mengintegrasikannya ke dalam mata pelajaran sehingga tidak berdiri sendiri. Kurikulum muatan lokal kebencanaan dipilih untuk diintegrasikan ke dalam mata pelajaran maupun ekstrakurikuler agar waktu/jadwal pelajarannya lebih fleksibel karena masih kurangnya tenaga pendidik kebencanaan.

Bentuk pengintegrasian kurikulum kebencanaan ke dalam mata pelajaran yakni berupa pembuatan RPP, seperti IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Olahraga, sedangkan pada ekstrakurikuler diintegrasikan ke dalam materi dan simulasi kebencanaan pada ekstrakurikuler pramuka dan PMR.

Guna menunjang pelaksanaan kurikulum muatan lokal kebencanaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara juga menyusun buku kebencanaan, yang kemudian dinamai *Buku Pintar Sekolah Tangguh Bencana: Pengetahuan Dasar Pengurangan Risiko Bencana di Kabupaten Banjarnegara*. Penyusunan buku pintar kebencanaan bagi SMP disesuaikan dengan keadaan dan potensi bencana yang ada di sekitar wilayah Banjarnegara. Buku pintar tersebut

berisi materi kebencanaan, seperti pengetahuan dasar kebencanaan, penanggulangan bencana nasional, Banjarnegara: kabupaten rawan bencana, serta pengenalan mengenai bencana tanah longsor, kebakaran dan gempa bumi. Buku tersebut selanjutnya didistribusikan ke seluruh sekolah jenjang Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banjarnegara.

Buku mulok kebencanaan tersebut tidak bersifat wajib bagi SMP di wilayah Banjarnegara karena hanya sebatas penunjang fasilitas belajar mengajar. Dindikpora mengatakan bahwa buku tersebut tidak bersifat wajib karena muatan lokal kebencanaan sendiri belum berdiri sendiri seperti mulok yang lain, misalnya mulok dawet ayu. Penggunaan buku tersebut belum maksimal, selain karena SMP yang ada di Banjarnegara sebagian besar SMP merupakan Sekolah Adiwiyata (*Green School*) yang mana lebih fokus kepada kepedulian terhadap lingkungan dan pertamanan sehingga buku mulok kebencanaan dianggap kurang relevan dan efektif untuk digunakan. Di samping itu, juga karena belum meratanya pendistribusian buku mulok kebencanaan, hal ini dibuktikan dengan belum semua SMP mendapatkan buku tersebut. 2 dari 4 SMP di wilayah atas Banjarnegara yang merupakan daerah rawan bencana, mengatakan bahwa mereka

belum mendapatkan buku mulok kebencanaan hingga saat ini.

Setelah adanya program pendidikan kebencanaan berupa mulok kebencanaan bagi SMP, barulah rambu-rambu tersebut dipasang di tiap sudut sekolah. Rambu-rambu kebencanaan sangat penting di pasang di sekitar sekolah. Pemasangan rambu ini memudahkan untuk proses evakuasi bagi seluruh warga sekolah apabila terjadi bencana di sekolah tersebut.

Adapun pemasangan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul yang dilaksanakan di SMP, dilakukan secara mandiri dalam arti memfasilitasi sendiri tanpa adanya pemberian sarana dan prasarana dari BPBD Banjarnegara. Pihak sekolah memasang rambu tersebut berdasarkan instruksi langsung dari BPBD Banjarnegara, kemudian sekolah mencetak rambu jalur evakuasi sendiri dan memasangnya di beberapa sudut sekolah. Dari 4 lokasi SMP yang sudah dikunjungi, terdapat 2 sekolah dengan rambu jalur evakuasi dan titik kumpul belum terpasang, yakni SMP Negeri 1 Wanayasa dan SMP Ma'arif NU 01 Karangkoar. Di samping itu, meski rambu jalur evakuasi yang terdapat di SMP Negeri 1 Batur sudah terpasang, namun beberapa diantaranya terlepas akibat adanya angin kencang pada bulan Januari 2019 lalu. Sedangkan untuk rambu titik kumpul belum terpasang pada ke-empat SMP tersebut. Akan

tetapi, pihak sekolah mengatakan bahwa titik kumpul berada di lapangan sekolah karena lokasinya terbuka dan jauh dari bangunan maupun gedung tinggi.

### ***Kebutuhan Finansial***

Biaya yang dianggarkan pada program ini sebesar Rp. 100.000.000,-. Dana tersebut digunakan untuk proses penyusunan kurikulum dan buku mulok kebencanaan, percetakan dan pendistribusian buku, serta untuk biaya bintek dan diklat bagi guru SMP. Anggaran tersebut masih dianggap kurang mengingat banyak kebutuhan yang belum terpenuhi, seperti percetakan buku mulok kebencanaan yang hingga kini masih di cetak dalam jumlah yang terbatas. Masing-masing SMP hanya menerima 11 buah buku mulok kebencanaan dan jumlah SMP yang ada di wilayah Banjarnegara adalah 98 sekolah yang berarti buku yang telah dicetak berjumlah 1078 eksemplar, sedangkan masing-masing sekolah memiliki rerata siswa berjumlah 230 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah buku yang diterima tidak sebanding dengan jumlah peserta didik di sekolah.

### ***Kebutuhan Sumber Daya Manusia***

Dalam hal program pendidikan kebencanaan, aktor yang terlibat yakni BPBD, Dindikpora,

dan sekolah. BPBD Banjarnegara memiliki 33 SDM yang terdiri dari 29 laki-laki dan 4 perempuan guna mendukung jalannya tupoksi organisasi. Bidang yang menangani program pendidikan kebencanaan adalah bidang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Bidang ini relevan dengan program pendidikan kebencanaan mengingat bidang ini bergerak dalam program-program mitigasi bencana, salah satunya dengan mengadakan pendidikan kebencanaan di sekolah-sekolah.

Kualitas sumber daya manusia, khususnya BPBD, secara umum sangat baik, namun kuantitasnya masih terbatas karena belum sesuai dengan bobot nilai rawan bencana. Oleh karena itu, BPBD membentuk relawan-relawan baru untuk membantu memenuhi kebutuhan SDM yang ada. Pihak BPBD bekerja sama dengan DPU, Dinsos, PMI, Basarnas maupun SAR-Kab untuk memenuhi sarana dan prasarana yang dirasa masih kurang memadai. Kerja sama tersebut bukan hanya berupa prasarana, namun juga sarannya seperti ketika BPBD akan melakukan sosialisasi maupun simulasi, maka PMI atau Dinsos akan bersedia membantu memfasilitasi dan sebaliknya. Selain itu, BPBD Kabupaten Banjarnegara juga sempat bekerja sama dengan Badan Geologi Bandung untuk melakukan sosialisasi kebencanaan di 5 SMP yang ada di Banjarnegara.

Sumber daya aparatur Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara yang bertanggungjawab dalam pendidikan kebencanaan bagi jenjang sekolah menengah pertama berada di bawah tanggung jawab Seksi Kurikulum Bidang Sekolah Menengah Pertama. Jumlah pegawai pada Bidang Sekolah Menengah Pertama adalah 15 orang yang terdiri dari 8 orang pegawai Seksi Kurikulum Bidang Sekolah Menengah Pertama dan 7 orang pengawas SMP. Seksi Kurikulum Bidang Sekolah Menengah Pertama ini memiliki kewenangan dalam penyusunan kurikulum dan buku muatan lokal kebencanaan.

Kualitas dan kuantitas dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara sudah baik, akan tetapi yang menjadi kendala adalah belum tersedianya tenaga pendidik kebencanaan secara khusus pada Dindikpora Banjarnegara. Ketidakterediaan tenaga pendidik kebencanaan dan terbatasnya personel BPBD Banjarnegara, membuat pendidikan kebencanaan di sekolah menjadi kurang maksimal. Selain tidak mudahnya membuat dan menerapkan sebuah kurikulum, dalam hal ini kurikulum kebencanaan, faktor ketersediaan SDM pun menjadi salah satu kendala. Sebuah program tidak akan berjalan dengan baik apabila SDM yang tersedia tidak memadai. Hal ini

juga tengah dirasakan oleh Dindikpora dan BPBD Banjarnegara dalam pelaksanaan program pendidikan kebencanaan di sekolah menengah.

Kebutuhan sumber daya manusia dalam pelaksanaan pendidikan kebencanaan di SMP belum cukup memadai. BPBD Banjarnegara masih kewalahan dalam menanggapi permintaan baik sosialisasi, pelatihan maupun pendampingan kebencanaan di sekolah-sekolah mengingat minimnya personel yang ada dan waktu yang terbatas. Dalam kurun waktu 2 tahun saja, BPBD belum menyelesaikan target sosialisasi dengan baik, dibuktikan dengan persentase sosialisasi yang telah dilaksanakan baru sebesar 10%. Dindikpora dan sekolah pun tidak dapat berbuat banyak mengingat mereka bukan berasal dari bidang kebencanaan, sehingga hanya mengandalkan BPBD saja. Agar tetap menjaga dan meningkatkan kapasitas SDM, BPBD Kabupaten Banjarnegara kerap mengirimkannya untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan kebencanaan baik tingkat provinsi maupun nasional.

## **2. Kesesuaian Perencanaan dengan Tujuan Program Pendidikan Kebencanaan**

Penyusunan program pendidikan kebencanaan dilatarbelakangi oleh masih rendahnya

pengetahuan dan pemahaman masyarakat Banjarnegara akan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana. Sebagian besar masyarakat masih bersikap acuh terhadap bencana, hal ini dibuktikan dengan salah satu kasus bencana tanah longsor yang terjadi di Dusun Jemblung, Kecamatan Karangkojar akhir tahun 2014 silam. Tanda-tanda akan terjadinya longsor telah jelas terlihat dan beberapa warga menyadari itu, namun mereka memilih bersikap masa bodoh sehingga ketika bencana terjadi kerugian material dan korban jiwa tidak dapat dihindarkan. Bahkan, hingga saat ini masih terdapat 125 korban jiwa yang belum ditemukan.

Tujuan dari program pendidikan kebencanaan adalah untuk memberikan bekal pengetahuan terkait kebencanaan dan kesiapsiagaan bencana bagi pendidik dan peserta didik agar dapat meminimalisir dampak resiko bencana yang terjadi. Tujuan pendidikan kebencanaan sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara dan Renstra BPBD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022. Dunia pendidikan menjadi agen yang sangat ideal untuk menyebarkan pengetahuan tentang kebencanaan, baik bagi individu, kelompok, maupun masyarakat luas.

Perencanaan program pendidikan kebencanaan bagi sekolah menengah di Banjarnegara

telah sesuai dengan tujuan program tersebut. Seperti halnya yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017-2022, yakni meningkatkan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana yang kemudian diterjemahkan oleh Dindikpora dan BPBD Banjarnegara dengan membuat program pendidikan kebencanaan bagi SMP sebagai upaya pengurangan resiko bencana di sekolah. Tujuan dari pembelajaran pendidikan kebencanaan baik bagi SMP yaitu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa terhadap kebencanaan sejak dini sehingga mampu membantu proses penyelamatan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Hal ini dibuktikan dengan semakin pedulinya siswa SMP terhadap bencana dengan mengikuti setiap kegiatan dari BPBD Banjarnegara. peserta didik SMP juga terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh BPBD Banjarnegara, seperti aktif membantu proses evakuasi bencana, menghibur masyarakat korban bencana (*trauma healing*), dan aktif dalam sekolah sungai. Siswa SMP di wilayah Banjarnegara juga selalu melakukan kegiatan penggalangan dana setiap terjadi bencana baik di dalam maupun luar daerah.

## ***Efisiensi Program Pendidikan Kebencanaan***

Efisiensi merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam upaya mencapai keberhasilan sebuah program dengan penggunaan sumberdaya secara optimal. Efisiensi memiliki makna melaksanakan dan menghasilkan segala sesuatu dengan tepat. Keefisienan sebuah program menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah. Efisiensi sebuah program dilihat dari ketepatan pengelolaan waktu, penggunaan biaya yang minim akan tetapi berdampak besar dalam perkembangan kemajuan program pendidikan kebencanaan, serta Sumberdaya Manusia yang memadai dan mumpuni. Efisiensi program dapat diukur dari ketepatan pengelolaan waktu, ketepatan pengelolaan biaya dan adanya SDM yang memadai guna menyukseskan jalannya program.

### **1. Ketersediaan SDM sebagai Penanggungjawab Program Pendidikan Kebencanaan**

Sebuah program perlu memiliki penanggungjawab agar pelaksanaan program tersebut dapat terkontrol dan berjalan dengan baik dan semestinya. Dari hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari peraturan bupati, program pendidikan kebencanaan bagi jenjang SMP yang berupa muatan lokal kebencanaan berada di bawah tanggung jawab Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara

yang secara spesifik dibawah oleh Bapak Suhardi, S.Pd., M.M selaku Kepala Seksi Kurikulum Bidang Sekolah Menengah Pertama. Seksi Kurikulum Bidang Sekolah Menengah Pertama bertanggung jawab dalam penyusunan kurikulum dan buku muatan lokal kebencanaan untuk jenjang SMP. Dalam penyusunannya, Dindikpora bekerja sama dengan BPBD dan PMI Kabupaten Banjarnegara. Kemudian, pelaksanaan mulok kebencanaan di lapangan diserahkan kepada masing-masing SMP di wilayah Banjarnegara. Dalam hal ini, kepala sekolah selaku pimpinan sekolah berperan sebagai penanggungjawab program. Kendati demikian, hingga kini belum ada supervisi resmi yang dilakukan oleh Dindikpora bagi SMP-SMP terutama sekolah yang berada di daerah atas yang juga termasuk zona rawan bencana. Hanya beberapa sekolah yang berada di wilayah kota yang telah dilaksanakan supervisi oleh Dindikpora, akan tetapi hanya sebatas menanyakan perkembangan pelaksanaan mulok secara lisan tanpa adanya laporan resmi yang tertulis.

Terlepas dari adanya penanggung jawab program yang telah dipaparkan di atas, dapat dilihat bahwa belum ada jalur koordinasi yang jelas terkait pertanggung jawaban program pendidikan kebencanaan baik bagi jenjang SMP. Hal ini dibuktikan

dengan tidak adanya laporan pertanggung jawaban secara tertulis dan tidak adanya supervisi pelaksanaan program pendidikan kebencanaan di SMP.

## **2. Ketersediaan Anggaran Program Pendidikan Kebencanaan**

Sebuah program dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila ada dukungan biaya atau anggaran. Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan program pendidikan kebencanaan bagi SMP berasal dari APBD, namun anggaran tersebut masih terbatas. Biaya program pendidikan kebencanaan bagi SMP ini dianggarkan oleh Dindikpora Kabupaten Banjarnegara sebesar Rp. 100.000.000,-. Ketersediaan anggaran tersebut telah dimanfaatkan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bintek), serta untuk biaya percetakan buku kebencanaan. Anggaran tersebut berasal dari APBD Kabupaten Banjarnegara yang kemudian dilimpahkan langsung ke Dindikpora Kabupaten Banjarnegara.

## **3. Kesesuaian Waktu Pelaksanaan Program Pendidikan**

Program pendidikan kebencanaan telah direncanakan sejak tahun 2017. Namun, baru resmi diimplementasikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama mulai awal tahun ajaran baru 2018/2019, dalam pelaksanaannya

sendiri baru berjalan 7 bulan sejak program ini diluncurkan. Program pendidikan kebencanaan bagi jenjang SMP ini diimplementasikan dalam bentuk muatan lokal kebencanaan sesuai dengan Perbup Banjarnegara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Muatan Lokal Kebencanaan.

Pelaksanaan implementasi program pendidikan pada jenjang SMP berupa muatan lokal kebencanaan yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah. Sebagian sekolah sudah mengintegrasikan materi kebencanaan pada RPP dan beberapa mata pelajaran seperti, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Olahraga. Selain itu juga dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler. Hingga kini program tersebut masih terus berjalan. Dalam pelaksanaannya, muatan lokal kebencanaan bukanlah mata pelajaran khusus sehingga waktu pelaksanaannya tidak terjadwal dan menyesuaikan bahasan materi dari mata pelajaran. Akan tetapi, hal ini justru tidak efisien karena menjadikan siswa mudah lupa akan materi kebencanaan yang telah dipelajari sebelumnya.

Pelaksanaan program pendidikan kebencanaan bagi sekolah menengah memiliki jangka waktu 5 tahun sesuai dengan RPJMD Kabupaten Banjarnegara dan Renstra BPBD Banjarnegara tahun 2017-2022. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, program

tersebut dapat dikatakan kurang efisien mengingat pelaksanaannya hanya dilakukan dengan menyesuaikan materi pelajaran yang memiliki keterkaitan dengan kebencanaan. Namun, pelaksanaan program ini akan terus berlanjut mengingat potensi ancaman bencana di Banjarnegara cukup tinggi dan bencana tidak dapat diprediksi sehingga bekal pengetahuan akan kebencanaan harus selalu ditanamkan sejak dini dan kontinu.

### ***Efektivitas Program Pendidikan Kebencanaan***

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target baik kualitas maupun kuantitas program yang telah dicapai dengan target awal yang sebelumnya telah ditentukan terlebih dahulu. Efektivitas merupakan hal pokok yang digunakan untuk mencapai tujuan ataupun sasaran yang telah ditentukan oleh stakeholder dalam sebuah program. Mengingat pentingnya sebuah program yang tepat sasaran serta berdaya guna, efektivitas sebuah program juga menjadi pertimbangan dan perhatian pemerintah. Dikatakan efektif apabila tujuan maupun sasaran program sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Program pendidikan kebencanaan efektif diterapkan di seluruh sekolah di Kabupaten Banjarnegara, terlebih bagi sekolah yang berada di zona rawan bencana. Efektivitas program pendidikan kebencanaan dapat dilihat dari 1) ketersediaan buku muatan lokal

kebencanaan, 2) terlaksananya workshop dan pelatihan kebencanaan, dan 3) tercapainya tujuan program pendidikan kebencanaan.

### **1. Tersedianya Buku Pintar Muatan Lokal Kebencanaan**

Pendistribusian buku dilakukan langsung oleh Dindikpora Banjarnegara yang selanjutnya diserahkan kepada setiap SMP yang ada di Banjarnegara. Buku muatan kebencanaan tersebut tidak bersifat wajib bagi SMP di wilayah Banjarnegara karena hanya sebatas penunjang fasilitas belajar mengajar. Dindikpora mengatakan bahwa buku tersebut tidak bersifat wajib karena muatan lokal kebencanaan sendiri belum berdiri sendiri seperti muatan yang lain, misalnya muatan dawet ayu. Penggunaan buku tersebut belum maksimal, selain karena SMP yang ada di Banjarnegara sebagian besar SMP merupakan Sekolah Adiwiyata (*Green School*) yang mana lebih fokus kepada kepedulian terhadap lingkungan dan pertamanan sehingga buku muatan kebencanaan dianggap kurang relevan dan efektif untuk digunakan. Di samping itu, juga karena belum meratanya pendistribusian buku muatan kebencanaan, hal ini dibuktikan dengan belum semua SMP mendapatkan buku tersebut. 2 dari 4 SMP di wilayah atas Banjarnegara yang merupakan daerah rawan bencana yang mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan buku

mulok kebencanaan hingga saat ini. Sekolah tersebut adalah SMP Ma'arif NU 01 Karangobar dan SMP Negeri 1 Karangobar. Pernyataan tersebut berbanding terbalik dengan apa yang dikatakan oleh pihak Dindikpora. Pihaknya mengatakan bahwa pendistribusian buku telah dilakukan di seluruh SMP.

Mengingat terbatasnya jumlah buku mulok kebencanaan yang diterima oleh masing-masing sekolah dan banyaknya beban materi pelajaran pada kurikulum saat ini, maka buku tersebut kurang dapat menunjang pelaksanaan pendidikan kebencanaan secara maksimal. Buku ini hanya dijadikan sebagai pegangan guru dan tidak dimanfaatkan semaksimal mungkin. Buku ini hanya digunakan pada saat guru tengah membahas materi yang memiliki keterkaitan dengan kebencanaan sehingga buku ini tidak digunakan setiap saat melainkan hanya digunakan pada waktu tertentu.

## **2. Pelaksanaan Workshop dan Pelatihan Kebencanaan**

Setelah kurikulum dan buku pintar kebencanaan disusun, selanjutnya dilakukan pelatihan dan workshop bagi Kepala Sekolah dan Guru jenjang SMP. Setiap sekolah wajib mengirimkan satu (1) perwakilan guru atau staffnya untuk mengikuti pelatihan dan workshop yang diselenggarakan oleh Dindikpora dan BPBD

Banjarnegara. Pelatihan dan workshop yang diikuti oleh guru SMP se-Kabupaten Banjarnegara ini dilaksanakan selama 3 hari dengan agenda mengupas buku pintar sekolah tangguh bencana. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mengenalkan pendidikan kebencanaan bagi guru yang nantinya ilmu yang diperoleh ditularkan langsung ke siswanya. Materi yang diberikan pada saat pelatihan adalah pengenalan resiko bencana, cara evakuasi mandiri, cara menghadapi bencana, dan lain-lain. Disamping pemaparan materi berupa ceramah dan diskusi, ditengah materi juga diselengi simulasi kebencanaan.

Selain guru, kepala sekolah menengah pertama di Kabupaten Banjarnegara juga mengikuti seminar kebencanaan yang diadakan di Politeknik Banjarnegara, kegiatan tersebut terbuka untuk umum. Baik seminar maupun pelatihan dan workshop dilakukan agar warga sekolah terutama tenaga pendidik lebih paham akan pentingnya pengurangan resiko bencana di masyarakat dan dapat menularkan pengetahuan mengenai kebencanaan tersebut kepada khalayak ramai bukan hanya untuk diri sendiri.

Tidak semua kepala sekolah ikut dalam seminar tersebut. 2 dari 4 sekolah menengah pertama telah mengikuti seminar kebencanaan tersebut, diantaranya Kepala SMP Negeri 1 Wanayasa dan Kepala

SMP Negeri 1 Batur. Sisanya yakni Kepala SMP Negeri 1 Karangobar dan Kepala SMP Ma'arif NU 01 Karangobar mengaku tidak mengikuti seminar yang diadakan oleh Politeknik Banjarnegara dengan menggandeng BPBD dan Dindikpora Kabupaten Banjarnegara.

### **3. Pencapaian Tujuan Pelaksanaan Program**

Program pendidikan kebencanaan mempunyai tujuan untuk memberikan bekal pengetahuan terkait kebencanaan dan kesiapsiagaan bencana bagi pendidik dan peserta didik. Pemberian pengetahuan kebencanaan bagi sekolah berupa sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan. Program pendidikan kebencanaan ini telah berjalan sesuai dengan tujuan program.

Dengan semakin banyaknya pemuda-pemudi yang menjadi relawan kebencanaan, menunjukkan bahwa tujuan program telah tercapai dengan baik. Para relawan muda ini sangat aktif untuk ikut serta dalam setiap kegiatan kebencanaan, baik ketika terjadi bencana maupun pada saat tidak terjadi bencana. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme siswa sekolah dalam membantu korban bencana alam, tidak hanya bantuan berupa materiil namun juga bantuan tenaga.

Peserta didik SMP menunjukkan bentuk kepeduliannya

terhadap bencana melalui penggalangan dana untuk membantu meringankan beban korban bencana.

Di samping itu, mereka juga melakukan kegiatan pengumpulan dan pendistribusian logistik dilakukan untuk mengurangi penderitaan korban melalui pemerataan pendistribusian bantuan. Hal ini menunjukkan kemampuan relawan muda bencana tidak perlu diragukan lagi. Di usianya yang masih muda, mereka sudah mampu membantu menghibur dan menyembuh trauma yang dirasakan oleh para korban bencana bahkan banyak diantaranya adalah anak-anak serta meringankan beban korban bencana melalui pendistribusian logistik yang mencukupi kebutuhan korban tersebut.

### ***Dampak Program Pendidikan Kebencanaan***

Sebuah program tentu memiliki dampak dalam hal pelaksanaannya. Dampak merupakan suatu perubahan yang dipengaruhi akibat adanya suatu aktivitas atau tindakan sebagai bentuk konsekuensi dari pelaksanaan sebuah kebijakan/program sehingga akan membawa perubahan positif maupun negatif. Dampak yang ditimbulkan dalam implementasi sebuah program akan menjadi pertimbangan dalam penentuan kebijakan selanjutnya.

## **1. Pengaruh Pelaksanaan Program Pendidikan Kebencanaan Jangka Pendek**

Pengaruh merupakan suatu keadaan adanya hubungan timbal balik antara yang mempengaruhi dengan yang dipengaruhi. Penerapan pendidikan kebencanaan pada SMP di Banjarnegara berdampak cukup signifikan bagi perkembangan pengetahuan peserta didik terkait kebencanaan.

Hal ini ditandai dengan antusiasme peserta didik ketika penyelenggaraan sosialisasi maupun simulasi mengenai pendidikan kebencanaan di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Banjarnegara serta bertambahnya pengetahuan dan wawasan siswa terkait mitigasi bencana dengan harapan dapat meminimalisir dampak resiko bencana. Simulasi yang dilakukan berupa simulasi terjadinya gempa dan cara menghadapinya, pertolongan pertama pada saat evakuasi korban, bagaimana cara evakuasi diri sendiri maupun orang lain ketika terjadinya bencana. Bertambahnya wawasan dan pemahaman serta antusiasme peserta didik dalam mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan mitigasi bencana merupakan salah satu bentuk pengaruh dari pelaksanaan pendidikan kebencanaan dalam jangka pendek.

## **2. Pengaruh Pelaksanaan Program Pendidikan Kebencanaan Jangka Panjang**

Pendidikan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) merupakan sebuah kegiatan jangka panjang dan bagian dari pembangunan berkelanjutan. Kegiatan mitigasi bencana yang dilakukan dalam tataran pendidikan di sekolah meliputi edukasi atau penyusunan kurikulum kebencanaan serta melakukan simulasi secara kontinyu guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dampak yang ditimbulkan akibat implementasi program pendidikan kebencanaan jangka panjang dapat dilihat dari semakin banyaknya generasi muda yang sudah memiliki minat untuk menjadi relawan kebencanaan. Tidak hanya bantuan berupa finansial, namun juga berupa bantuan tenaga.

Hingga kini, semakin banyak relawan muda yang berpartisipasi dalam kegiatan penanggulangan bencana. Relawan memiliki peran yang amat penting, baik dalam hal melakukan pengalangan dana, mengumpulkan bantuan logistik, maupun terjun langsung ke lokasi bencana untuk membantu evakuasi korban dan membantu membersihkan puing-puing bangunan.

Penerapan program pendidikan kebencanaan memberikan dampak yang positif

secara jangka panjang terutama bagi peserta didik. Pengaruh dari program tersebut menjadikan siswa lebih mandiri, menguasai ilmu kebencanaan yang sebelumnya dianggap tidak begitu penting, menumbuhkan dan meningkatkan empati siswa (rasa tolong-menolong), dan meningkatkan kerjasama antarindividu atau kelompok.

### ***Keberlanjutan Program Pendidikan Kebencanaan***

Keberlanjutan mempunyai makna suatu program yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan. Program yang berkelanjutan diperlukan agar sebuah program dapat berhasil mempertahankan kualitasnya. Pemerintah dalam hal ini Dindikpora dan BPBD juga mempertimbangkan keberlanjutan sebuah program, yang mana program pendidikan kebencanaan ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan dengan didukung pengembangan inovasi sehingga meningkatkan antusiasme peserta didik dalam mempelajari setiap materi yang diberikan. Keberlanjutan program pendidikan kebencanaan sangat penting terutama mengingat banyaknya sekolah yang berada di daerah yang rawan bencana. Program ini diharapkan mampu membuka kesadaran masyarakat terutama di dunia pendidikan sehingga resiko bencana dapat diminimalisir. Keberlanjutan program pendidikan kebencanaan pada jenjang sekolah menengah di

Banjarnegara dapat dilihat dari (1) adanya permintaan dari sekolah untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan secara kontinu terkait pendidikan kebencanaan, dan (2) adanya inovasi pendidikan kebencanaan agar pelaksanaan program pendidikan kebencanaan di sekolah dapat terus berkembang dan variatif.

### **1. Permintaan Sosialisasi dan Pendampingan Pendidikan Kebencanaan dari Sekolah**

Permintaan merupakan suatu bentuk keinginan yang ingin dipenuhi. Dalam sistem monitoring dan evaluasi, permintaan sangat penting untuk menunjang keberlanjutan pelaksanaan sebuah program maupun kegiatan. Permintaan dapat dirangsang ketika tujuan strategis pemerintah diterjemahkan ke dalam sistem evaluasi berbasis hasil, seperti strategi pengurangan resiko bencana bagi masyarakat.

Sejak awal peluncuran dan pengenalan program pendidikan kebencanaan di sekolah, BPBD Banjarnegara selalu mendapatkan permintaan dari sekolah-sekolah di wilayah Banjarnegara baik di daerah atas maupun daerah kota untuk melakukan sosialisasi, pelatihan dan pendampingan bagi guru maupun siswa.

Pelatihan tanggap bencana bagi guru SMP diselenggarakan di Aula Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga

Kabupaten Banjarnegara. Setelah guru-guru SMP melakukan pelatihan yang difasilitasi oleh Dindikpora dan BPBD Banjarnegara, selanjutnya banyak sekolah yang meminta untuk diberi sosialisasi, pelatihan dan pendampingan kebencanaan di sekolah agar pengetahuan terkait kebencanaan tidak hanya diterima oleh guru akan tetapi juga peserta didik. Pelatihan atau sosialisasi tersebut berupa pengenalan resiko bencana, penjabaran riwayat bencana di sekitar lingkungan sekolah, proses evakuasi, penanggulangan dan penanganan ketika terjadi bencana, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pendampingan, kegiatan diselenggarakan secara fleksibel melalui pembelajaran bagi warga sekolah dengan konten mitigasi bencana atau pengurangan resiko bencana secara umum agar meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tangguh bencana bagi seluruh warga sekolah. Sosialisasi dan pendampingan yang dilaksanakan oleh BPBD Banjarnegara belum terlaksana secara optimal. Permintaan sosialisasi dan pendampingan merupakan inisiatif dari sekolah yang kemudian ditindaklanjuti oleh BPBD. Hal tersebut sebagai bentuk kesadaran dan kepedulian pihak sekolah akan pentingnya wawasan kebencanaan sejak dini.

## **2. Inovasi Program Pendidikan Kebencanaan**

Inovasi merupakan sebuah ide atau gagasan yang diterima oleh seseorang atau sekelompok orang sebagai hal baru atau berbeda sebagai bentuk pengembangan dari program/kegiatan sebelumnya. Program pendidikan kebencanaan pada jenjang sekolah menengah selalu dilakukan pengembangan agar lebih variatif dan edukatif. Inovasi yang dilakukan salah satunya berupa pembuatan sekolah sungai yang mana melibatkan relawan sungai untuk mengadakan sekolah sungai agar terjadi regenerasi dengan memberikan bekal pengetahuan kebencanaan dari segi lain.

Kegiatan yang dilakukan sekolah sungai yakni, berupa pembersihan sungai dan penanaman pohon yang diikuti oleh, Destana, perwakilan Dindikpora, perwakilan TNI dan Polisi, penggiat sungai, siswa-siswi SMP sederajat, dan siswa SMA/SMK sederajat yang salah satunya merupakan perwakilan Tim Tangguh Bencana Sekolah/Madrasah Aman Bencana. Gerakan sekolah sungai tersebut sudah di mulai sejak bukan Oktober 2018 lalu, sebelumnya telah dilaksanakan rapat koordinasi lintas komunitas, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pihak terkait dengan membahas gerakan sekolah sungai ini. Kegiatan tersebut memiliki tujuan untuk melestarikan

lingkungan dan sebagai bentuk upaya pencegahan dan pengurangan risiko bencana banjir ketika musim penghujan tiba. Kegiatan yang dilakukan berupa workshop, aksi bersih sungai bersama 1000 sukarelawan, penanaman pohon di tepi sungai, dan penebaran benih ikan di sungai (SW, 2018).

Gerakan sungai ini juga bertujuan untuk memperindah tampilan sungai sehingga bisa dijadikan sebagai destinasi wisata, seperti yang telah dilakukan oleh sejumlah desa wisata yang memanfaatkan sungai untuk pariwisata. Selain dapat dijadikan destinasi wisata, kondisi sungai yang bersih dan terawat akan memberikan manfaat untuk pengairan, baik untuk sawah maupun budidaya ikan, sumber air minum warga. Saat ini, banyak perusahaan air minum daerah yang memanfaatkan air dari sungai sebagai sumber mata air untuk kemudian di olah (SW, 2018).

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Evaluasi Program Pendidikan Kebencanaan**

Proses evaluasi program pendidikan kebencanaan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor sehingga perencanaan maupun pelaksanaannya tidak berjalan secara optimal. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi evaluasi program tersebut, yakni internal dan eksternal.

#### ***Faktor Internal***

Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh Dindikpora maupun BPBD Kabupaten Banjarnegara menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi proses evaluasi program pendidikan kebencanaan. Keterbatasan SDM di bidang kebencanaan mempengaruhi ketercapaian kegiatan pendidikan kebencanaan di sekolah menengah, seperti sosialisasi atau diklat bagi guru dan siswa SMP. Sosialisasi di sekolah-sekolah yang dilakukan oleh BPBD baru sekitar 10% atau sekitar 14 sekolah yang berhasil dilaksanakan sosialisasi.

Belum adanya regulasi khusus terkait program pendidikan kebencanaan juga menjadi faktor pengaruh pelaksanaan M&E. Jika merujuk pada Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 93 Tahun 2017 tentang Muatan Lokal Kebencanaan, maka jelas disebutkan bahwa yang bertanggungjawab melaksanakan evaluasi adalah Dindikpora Kabupaten Banjarnegara, namun itu hanya dalam ranah Mulok jenjang SMP.

#### ***Faktor Eksternal***

Keterbatasan anggaran berkaitan dengan alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Anggaran program pendidikan kebencanaan berasal dari APBD yang jumlahnya terbatas, sedangkan kegiatan yang ada dapat dikatakan banyak. Permasalahan terkait keterbatasan

anggaran menjadi masalah serius, karena apabila alokasi anggaran yang diperoleh minim, maka akan menghambat aktivitas dan kegiatan program pendidikan kebencanaan di sekolah menengah sehingga pelaksanaan kegiatan tidak dapat berjalan dengan optimal. Hal tersebut diperlukan komunikasi dan kerjasama yang baik dari Pemerintah Kabupaten Banjarnegara selaku pembina program pendidikan kebencanaan terhadap Dindikpora dan BPBD Kabupaten Banjarnegara selaku pelaksana program.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian tentang Evaluasi Program Pendidikan Kebencanaan Pada Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 yang telah dipaparkan sebelumnya, pelaksanaan program pendidikan kebencanaan pada sekolah menengah tersebut belum berjalan dengan optimal dan masih terdapat kendala dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang masih terbatas sehingga menghambat jalannya kegiatan yang ada. Kendati demikian, terdapat dampak positif yang dirasakan dengan adanya program pendidikan kebencanaan tersebut, dilihat dari semakin tingginya tingkat kesadaran dan kepedulian generasi muda akan pentingnya pengetahuan dasar penanggulangan bencana sejak dini

mengingat sebagian besar sekolah di Banjarnegara merupakan daerah rawan bencana.

### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, maka didapatkan beberapa rekomendasi/saran sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara sebaiknya melakukan pengawasan dengan terlibat langsung di lapangan dan mengikuti jalannya program dan kegiatan pendidikan kebencanaan, terutama dalam hal penyelenggaraan muatan lokal kebencanaan jenjang Sekolah Menengah Pertama.
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banjarnegara perlu menjaga koordinasi dan kerjasama dengan pihak lain agar program/kegiatan pendidikan kebencanaan dapat berjalan dengan baik.
3. Pihak sekolah diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan program pendidikan kebencanaan sehingga terwujud budaya aman dan tangguh bencana di sekolah.
4. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara sebaiknya segera menyusun regulasi yang spesifik dan jelas terkait

program pendidikan kebencanaan dan memberikan alokasi dana lebih bagi penyelenggaraan program pendidikan kebencanaan. Hal ini dimaksudkan agar program/kegiatan pendidikan kebencanaan dapat berjalan dengan baik dan lancar tanpa ada kendala berupa keterbatasan anggaran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, W., & Kanegae, H. (2013). Efektivitas Dampak Penerapan Pendidikan Kebencanaan di Sekolah terhadap Kesiapsiagaan Siswa Menghadapi Bencana Tsunami di Aceh, Indonesia. *Majalah*, 57-65.
- Bhandari, R. K. (2014). *Disaster Education and Management*. India: Springer.
- Chikane, R. F. (2005). *Proposal and Implementation Plan for a Government-wide Monitoring and Evaluation System*. South Africa.
- Desfandi, M. (2014, Desember 2). Urgensi Kurikulum Pendidikan Kebencanaan Berbasis Kearifan Lokal Di Indonesia. *Sosio Didaktika*, 1(2), 191-198.
- Hamidi. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM.
- Jannah, N. M., Subiyakto, R., & Kuriandaru, S. (2015, Juni 4). Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana di Sekolah dan Praktik Pendidikan Untuk Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana Gunung Api. Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia.
- Kompri, M. (2015). *Manajemen Pendidikan: Komponen-Komponen Elementer Kemajuan Sekolah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Kusek, J. Z., & Rist, R. C. (2004). *Ten Steps to a Results-Based Monitoring and Evaluation System*. Washington DC: The World Bank.
- Lin, C. K., Abdul, N. F., Musa, S., Sharron, S. A., & Anuar, N. A. (2016). Challenges and Opportunities of Disaster Education Program Among UMM Student. *3rd International Conference on Applied Science and Technology (ICAST'18)* (pp. 020038-1 - 020038-6). Malaysia: AIP Publishing.
- Miles & Hubberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.
- Mulyono, A. T. (2007). *Model Evaluasi Pemberlakuan Standar Mutu Perkerasan Jalan Berbasis Pendekatan Seismik*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Munthe, A. P. (2015). Pentingnya Evaluasi Program di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Scholaria*, 5(2), 3.

- Noor, D. (2011). *Geologi untuk Perencanaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Muzaki, K. (2018, Juli 20). Ketika Materi Kebencanaan Masuk Kurikulum Ajar 2018/2019 di Sekolah-sekolah Banjarnegara. Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Nugroho, R. D. (2014). *Public Policy: Teori, Manajemen, Dinamika, Analisis, Konvergensi, dan Kimia Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Putri, A. D. (2017, Desember 18). Pentingnya Pendidikan untuk Penanggulangan dan Darurat Bencana. Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia: Kompas.com.
- Sabri, Sari, S. A., Milfayetty, S., & Dirhamsyah, M. (2014, Agustus). Pengaruh Pengintegrasian Materi Kebencanaan ke dalam Kurikulum Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami Pada Siswa Sekolah Dasar dan Menengah di Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Kebencanaan*, 1(1), 35-41.
- Shaw, R., Shiwaku, K., & Takeuchi, Y. (2011). *Disaster Education: Community, Environment and Disaster Risk Management* (Vol. 7). United Kingdom: Emerald Group Publishing Limited.
- Sinaga, S. N. (2015, Januari). Peran Petugas Kesehatan dalam Manajemen Penanganan Bencana Alam. *Jurnal Ilmiah "INTEGRITAS"*, 1(1).
- Sudjana, N. (2009). *Penilaian Hasil Belajar Mengajar*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono, P. D. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suryana, A. (2010). *Strategi Evaluasi (Monev) Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah*. Bandung: U Putera Indonesia.
- Triutomo, S., & dkk. (2011). *Perencanaan Kontinjensi Menghadapi Bencana (Edisi Ketiga)*. Jakarta: BNPB.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group.